

# jurnal birpol.pdf

*by* Turnitin .

---

**Submission date:** 29-Apr-2024 09:09AM (UTC+0530)

**Submission ID:** 2353995964

**File name:** jurnal\_birpol.pdf (273.68K)

**Word count:** 4519

**Character count:** 29105

**Analisis Pengimplementasian Materi Bimtek saat Pelaksanaan  
Pemungutan & Perhitungan Suara oleh KPPS dalam Pemilu 2024  
(Studi Kasus : Kelurahan Petukangan Utara)**

**Khansa Khairun Nisa Jatmiko Putri<sup>1</sup>, Ananda Putri Khaila<sup>2</sup>, Fadly  
Firmansyah<sup>3</sup>, Dina Thalentaria Nainggolan<sup>4</sup>**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta<sup>1234</sup>

\*E-mail: khansakhairunnisa003@gmail.com

**ABSTRACT**

Elections are a characteristic of a democratic country, held once every 5 years in Indonesia. The holding of democratic elections can't be separated from the democratic implementation process. Since 2015, elections have been held simultaneously. The 2024 elections will include legislative and presidential votes. In the 2024 elections, several problems have arisen due to the limited number and experience of PPS members, the BIMTEK implementation schedule, the mechanism for implementing BIMTEK materials, ad hoc recruitment process, the professionalism and heavy workload of KPPS . Based on these issues, this research aims to analyze the ability to implement technical guidance materials during the voting and vote-counting process by KPPS in the 2024 elections, focusing on the Petukangan Utara Subdistrict, Pesanggrahan District, South Jakarta. This study used qualitative research methods. Data collection was carried out through interviews in the field with relevant stakeholders. The results of the research indicate that there are still significant obstacles in implementing the voting and vote-counting process by KPPS in Petukangan Utara Subdistrict. This is influenced by various factors, such as limited time and space in distributing BIMTEK materials, technological obstacles related to SIREKAP, as well as the limited knowledge and experience of KPPS members.

**Keywords:** *Election, Democracy, Qualitative Research, KPPS Workload, BIMTEK, Limited Knowledge, Professionalism*

## ABSTRAK

Pemilu merupakan salah satu ciri dari negara yang menganut sistem demokrasi, dimana pelaksanaan pemilu di Indonesia pasca orde baru diselenggarakan selama 5 tahun sekali. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis tidak lepas dari proses penyelenggaraannya yang demokratis. Sejak tahun 2015, pemilu diselenggarakan secara serentak. Pemilu serentak 2024 melaksanakan pemilihan pada pemilu legislatif dan juga memilih presiden dan wakil presiden. Pada pemilu 2024, terjadi beberapa masalah yang diantaranya bersumber pada permasalahan keterbatasan jumlah dan pengalaman anggota PPS, jadwal pelaksanaan BIMTEK, mekanisme pelaksanaan materi BIMTEK, recruitment penyelenggara ad hoc dalam pemilu, profesionalitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan beban kerja KPPS yang berat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan mengimplementasikan materi bimtek saat pelaksanaan pemungutan & perhitungan suara oleh KPPS dalam pemilu 2024, dengan studi di Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara di lapangan kepada stakeholder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak kendala dalam pelaksanaan proses pemungutan dan perhitungan suara oleh KPPS di Kelurahan Petukangan Utara. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan waktu dan tempat dalam pendistribusian materi BIMTEK, kendala teknologi terkait SIREKAP, serta pengetahuan dan pengalaman anggota KPPS yang masih terbatas.

**Kata Kunci:** Pemilu, Demokrasi, Penelitian Kualitatif, Beban Kerja KPPS, BIMTEK, Keterbatasan Pengetahuan, Profesionalitas

## PENDAHULUAN

Pemilu merupakan satu hal yang sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia karena pemilu adalah sebuah pesta demokrasi yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Adanya pemilu 5 tahunan sekali ini tentu melibatkan seluruh aspek lapisan masyarakat. Pemilu di Indonesia sendiri memiliki lembaga penyelenggara yang berwenang dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Mengacu pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat tiga lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia. Di antara lain adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), selain KPU lembaga penyelenggara pemilu lainnya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

KPU yang merupakan lembaga independen tingkat nasional yang penyelenggaraannya akan dibantu dengan KPU tingkat provinsi, kabupaten/kota yang bersifat hierarkis untuk melakukan distribusinya agar sampai hingga ke seluruh masyarakat dan wilayah di Republik Indonesia. Luasnya cakupan pekerjaan yang dikerjakan oleh KPU RI. Pembagian divisi dan *jobdesk* dalam KPU RI tidak lain untuk memudahkan para birokrat dalam KPU agar dapat menyelenggarakan pemilu dengan hasil yang maksimal.

Maka dari itu di dalam struktur kepengurusan KPU RI terdapat dua deputi dan dua inspektorat utama untuk menjalankan pekerjaannya. Dua deputi tersebut diantaranya adalah Deputi Bidang Dukungan Teknis dan Deputi Bidang Administrasi. Dalam Deputi Bidang Dukungan Teknis membawahi 5 biro yaitu; Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Biro Logistik, Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Biro Perundang-undangan, dan Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Persiapan dan pelaksanaan yang berhubungan dengan teknis operasional pemilu seperti dukungan logistik dan distribusi, penyusunan rancangan peraturan, bantuan hukum, hubungan masyarakat, dokumentasi hukum, penyelesaian sengketa Pemilu merupakan fungsi dari deputi ini. Sedangkan Deputi Bidang Administrasi yang berfungsi untuk mengelola SDM, tata usaha, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta kearsipan dan pengelolaan di lingkungan KPU. Dalam Deputi Bidang Administrasi juga melakukan koordinasi dengan KPU tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota.

Namun, tidak hanya para pejabat, anggota, sekjen maupun tenaga ahli KPU saja yang berperan dalam menyelenggarakan pemilu. Melalui KPU Kabupaten/Kota membentuk panitia Ad Hoc untuk membantu pekerjaan KPU dalam pelaksanaan pemilu. Peran Ad Hoc menjadi sangatlah penting karena sebagai penentu keberhasilan pemilu secara maksimal. Sebagai bentuk perpanjangan tangan KPU panitia Ad Hoc yang dibentuk juga mempunyai payung hukum dalam melaksanakan pekerjaannya (Lita Rosita, 2020). Panitia Ad Hoc KPU diantaranya terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Panitia Ad Hoc KPU juga bersifat hierarkis dimana PPK bertugas di tingkat kecamatan, PPS di tingkat kelurahan/desa, dan KPPS bertugas melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara. Sedangkan PPLN dan KPPSLN wilayah kerjanya adalah di luar negeri. Sebagai salah satu penyelenggara pemilu, panitia Ad Hoc juga mengucapkan sumpah dan melakukan pelantikan.

Masyarakat dapat mendaftar sebagai panitia Ad Hoc dan nantinya akan diberikan bekal melalui bimbingan teknis dari KPU. Materi bimbingan teknis yang akan disampaikan kepada badan Ad Hoc dinaungi oleh divisi teknis penyelenggaraan bersama dengan biro partisipasi dan hubungan masyarakat sesuai dengan yang tertera dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2020. Tentu distribusi materi bimbingan teknis yang diterima panitia Ad Hoc KPU seluruh wilayah di Indonesia akan sama termasuk di Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan.

Kelurahan Petukangan Utara merupakan sebuah wilayah yang berada di Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan yang terbagi menjadi 186 TPS dengan jumlah 1.302 petugas KPPS yang terdiri dari 11 RW dimana merupakan TPS terbanyak di wilayahnya. Sayangnya petugas PPS dan KPPS pemilu 2024 sebagian besar tidak memiliki pengalaman di pemilu tahun 2019. Ujung tombak penyelenggaraan pemilu tentu mendapatkan sorotan khusus karena dianggap sebagai penentu keberhasilan pemilu 2024. Masih banyak keterbatasan yang dimiliki oleh KPPS mulai dari pemahaman, teknis pelaksanaan pemungutan suara

dan perhitungan suara oleh Ketua dan Anggota KPPS. Tidak bisa dipungkiri bahwa kurangnya pengetahuan atau keterampilan dari KPPS karena kurang maksimalnya pelaksanaan bimbingan teknis yang diberikan oleh KPU. Terlebih lagi para petugas Ad Hoc ini adalah masyarakat awam.

Kekeliruan yang dilakukan petugas KPPS akibat banyak nya hal yang tidak dipelajari dalam bimbingan teknis, namun harus mereka hadapi. Tuntutan pekerjaan yang banyak serta waktu bekerja yang berlebihan membuat KPPS melakukan kesalahan dalam melakukan pemungutan dan perhitungan suara seperti di TPS 56 Kelurahan Petukangan Utara. Selain KPPS yang belum berpengalaman banyaknya perubahan penyelenggaraan teknis pemungutan dan perhitungan suara di pemilu 2024, bimbingan teknis juga dibutuhkan bagi petugas yang sudah pernah menjadi anggota KPPS.

Maka dari itu pembekalan yang diberikan kepada panitia Ad Hoc melalui PPS kepada KPPS harus ada pengawasan dari KPU karena kesuksesan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan KPPS berangkat dari pengetahuan dan kemampuan petugas KPPS. Mengacu pada keputusan KPU No 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum. KPU sudah membuat materi yang sangat lengkap hingga 200+ lembar halaman yang membuat petugas KPPS memerlukan bimtek yang cukup masif untuk memahaminya. Oleh sebab itu pertanyaan penelitian jurnal ini adalah ingin melihat bagaimana pola komunikasi/distribusi informasi bimtek yang diterima oleh PPS dari KPU. Dilanjutkan dengan bagaimana peran strategis PPS Kelurahan petukangan utara dalam pelaksanaan BIMTEK. Jurnal ini juga ingin mengetahui mengapa masih terjadi kesalahan implementasi materi BIMTEK pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara oleh KPPS.

## METODE PENELITIAN

Dalam melakukan metode penelitian, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan melakukan studi dokumentasi yang berupa

wawancara mendalam kepada subjek penelitian yang terlibat untuk memandu penulis agar dapat mengeksplorasi hasil wawancara secara detail dan mendalam. pengertian dari pendekatan kualitatif adalah data deskriptif yang berasal dari pengamatan perilaku orang-orang dalam penelitian yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan (Lexy J. Meleong, 2018). Fokus dari penelitian kualitatif pada fenomena sosial yang terjadi berdasarkan pandangan dari partisipan. Dengan melakukan studi dokumentasi penulis berusaha untuk memvisualisasikan perspektif para pihak yang terlibat dengan melalui materi berupa dokumen-dokumen tertulis yang dihasilkan pihak terkait.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Analisis Pengimplementasian Materi Bimtek saat Pelaksanaan Pemungutan & Perhitungan Suara oleh KPPS dalam Pemilu 2024 (Studi Kasus : Kelurahan Petukangan Utara)”. Penelusuran dokumen agar fenomena tersebut dapat dipahami secara menyeluruh, luas, dan dalam. Langkah yang diambil penulis dalam melakukan pengumpulan data adalah dengan cara wawancara langsung dengan Anggota PPS Kelurahan Petukangan Utara, dan Anggota KPPS TPS 56 Kelurahan Petukangan utara dengan maksud untuk menelaah tentang fenomena berdasarkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang dialami oleh subjek penelitian serta mendeskripsikannya melalui tulisan dan bahasa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pola Komunikasi dan Distribusi Informasi Bimtek oleh KPU Kota kepada PPS

Penyampaian materi BIMTEK (Bimbingan Teknis) dari KPU Kota kepada PPS (Panitia Pemungutan Suara) merupakan komunikasi yang efektif dan efisien. Dalam komunikasi tersebut, KPU kota akan memberikan informasi dan bimbingan teknis kepada PPS guna memperjelas pemilu yang akan berlangsung di Indonesia. komunikasi yang selalu disampaikan materi BIMTEK dari KPU kota ke PPS dapat dilakukan dengan berbagai cara, khususnya melalui informasi yang

diberikan secara langsung atau dengan menggunakan media elektronik seperti, melalui materi PDF yang diharapkan dapat dipahami oleh seluruh anggota PPS.

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2024 oleh penulis kepada Bagas Saputra (Anggota PPS Kelurahan Petukangan Utara) dapat dijelaskan bahwa, Materi BIMTEK disampaikan melalui KPU Kota Jakarta selatan kepada PPS Kelurahan Petukangan Utara, melalui wawancara dijelaskan setiap ada tahapan apa pun itu dalam masa pemilu PPS yang terlebih dahulu dilakukan BIMTEK oleh KPU Kota setelah itu mengerucut untuk di BIMTEK oleh PPS ke jajaran bawahannya contohnya seperti, PANTARLIH (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).

Selama masa BIMTEK, KPU Kota memberikan pembelajaran melalui materi yang disampaikan dan simulasi akan tetapi, menurut PPS simulasi yang diberikan kurang cukup karena terkendala oleh waktu dan tempat. KPU sendiri tidak memberikan anggaran untuk menyediakan tempat akan tetapi menyediakan anggaran untuk tenda. Untuk simulasi lebih ditekankan dalam simulasi menggunakan SIREKAP. munculnya SIREKAP di Pemilu 2024 membuat panitia harus benar-benar paham dalam menggunakan Website yang diluncurkan oleh KPU untuk masa Pemilu. Bagas Saputra (Anggota PPS Kelurahan Petukangan Utara), mengatakan :

*“Kalau untuk materi semua sama, apa yang dikasih tau oleh KPU Kota lurus langsung disampaikan ke KPPS. Untuk Bimtek diadakan dua kali, yakni materi dan simulasi. Cuman sayangnya tidak ada waktu untuk simulasi, kalau di Petukangan Utara untuk simulasi hanya ada di RW 9, sedangkan Bimtek dilaksanakan di tanggal 30 Januari 2024 - 01 Februari 2024, kemudian KPPS dilantik pada tanggal 25 Januari 2024. Untuk mengadakan simulasi minimal 3-4 jam. ketidak ketersediaan waktu dan tempat yang menjadi permasalahan. Sedangkan, Bimtek 1 sesi paling banyak 14 TPS yang dilaksanakan Bimtek”(wawancara: 21 Maret 2024).*

Terdapat kesulitan dalam memahami materi BIMTEK yang disalurkan dari PPS ke KPPS, berdasarkan hasil wawancara dijelaskan kesulitan yang terjadi

karena para anggota KPPS yang terpilih adalah pemilih muda yang baru dapat mengikuti Pemilu yang membuat kebingungan dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota KPPS akan tetapi, anggota KPPS yang sudah berpengalaman pada Pemilu 2019 juga ikut bingung karena adanya sistemnya baru, sedangkan informasi yang dijelaskan oleh KPU tidak lengkap atau bisa dikatakan sangat singkat untuk dijelaskan oleh PPS, sehingga PPS memberitahukan kepada jajaran bawahannya seperti apa adanya sesuai simulasi atau praktik yang diberikan oleh KPU.

Kesulitan lainnya terjadi juga pada saat pemberian materi dari PPS ke KPPS, dijelaskan oleh Bagus Saputra (Anggota PPS Kelurahan Petukangan Utara) mengatakan, pada saat pemberian materi para anggota KPPS tidak memperhatikan dengan baik, mereka lebih memilih untuk sibuk dengan dirinya sendiri seperti, merokok dan makan. Dengan itu cara salah satunya memberikan materi melalui video simulasi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh KPU, KPPS sering bertanya kepada PPS tentang bagaimana sistem kerja Website SIREKAP, sedangkan PPS tidak mengetahui secara detail bagaimana sistem tersebut karena PPS tidak mendapatkan akses untuk mengelola Website tersebut, yang memiliki akses hanya KPU dan PPK.

Kesimpulan dari wawancara yang telah dilaksanakan bersama dengan Bagus Saputra (Anggota PPS Petukangan Utara), dengan mengetahui pola komunikasi informasi BIMTEK oleh KPU kepada PPS adalah komunikasi yang kurang cukup dapat memberikan kekurangan informasi dan berlanjut kepada hal-hal lainnya seperti, jika ada informasi mengenai BIMTEK sudah seharusnya tidak memberikan kesan terburu-buru karena itu adalah hal yang penting untuk dimengerti oleh para petugas Pemilu karena petugas harus menyiapkan logistik, perlengkapan, dan lain-lain. kemudian untuk penerapan sistem baru lebih baik harus dicoba terlebih dahulu atau sistem harus terlebih dahulu benar-benar diperkuat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak muncul opini yang buruk kepada KPU, padahal kenyataannya yang salah adalah sistem.

### **Peran Strategis PPS dalam Pelaksanaan Bimtek kepada KPPS di Kelurahan Petukangan Utara**

Dalam konteks pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek), Panitia Pemungutan Suara (PPS) mempunyai peranan strategis yang sangat penting untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Secara pengertian, PPS merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemungutan suara di TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, KPPS merupakan pelaksana pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu di TPS yang bersifat sementara/AD-HOC (Kpu.go.id., 2014). KPPS didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 59 yang menegaskan bahwa PPS merupakan pihak pendiri KPPS. Dalam pembentukan KPPS, pertimbangan diberikan pada kesetaraan gender, tidak adanya prasangka, dan keterwakilan seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, salah satu tugas dan tanggung jawab PPS dalam melakukan proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS adalah untuk mendistribusikan materi Bimtek kepada KPPS sesuai dengan prosedur yang berlaku (Salim, M., P., 2023). Tujuannya yakni untuk mempersiapkan bimbingan teknis bagi KPPS untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul pada hari pemungutan suara serta proses penghitungan suara.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Vina Erdiana (Anggota KPPS Kelurahan Petukangan Utara) pada 21 Maret 2024, terungkap bahwa pendistribusian materi Bimtek dilakukan dengan cara yang kurang efektif. Materi Bimtek dibacakan dan dijelaskan oleh satu anggota PPS kepada kurang lebih lima puluh TPS tanpa adanya simulasi langsung terkait proses pemungutan dan perhitungan suara. Hal ini menyebabkan banyak anggota KPPS yang tidak dapat menghadiri atau memahami sepenuhnya isi dari KPPS tersebut. Selain itu, Bimtek hanya dilakukan satu kali dalam satu hari kerja, yakni pada Rabu, 31 Januari 2024, dan tidak ada peluang untuk pembekalan atau tindak lanjut kedua. Pendistribusian materi Bimtek secara langsung oleh satu anggota PPS tanpa adanya simulasi langsung dapat membuat anggota KPPS tidak dapat

menangani skenario apa pun yang mungkin timbul selama proses pemungutan suara di TPS.

Di mana hal tersebut juga sebenarnya merupakan tanggung jawab lain dari PPS untuk memastikan bahwa KPPS berisikan anggota yang berkompeten, netral, dan jujur serta memiliki pemahaman yang cukup untuk menjalankan tugasnya di TPS (Salim, M., P., 2023). Namun, KPPS Kelurahan Petukangan Utara juga mempunyai permasalahan terkait hal tersebut, antara lain yakni tingginya jumlah anggota yang belum berpengalaman, kebingungan mengenai kebijakan baru seperti penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), dan kurangnya waktu dan tempat untuk melakukan simulasi Bimtek. Hal tersebut juga disebabkan oleh distribusi materi Bimtek yang hanya diadakan satu kali dengan pembacaan materi dari PowerPoint tanpa adanya simulasi langsung proses pemungutan dan penghitungan suara. Akibatnya, anggota KPPS mungkin tidak siap atau memahami apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu yang mungkin timbul saat proses pemungutan suara di TPS. Selain itu, pemahaman KPPS terhadap isi materi sangat dipengaruhi oleh waktu penyampaian materi Bimtek. Menurut anggota KPPS yang diwawancarai, pengenalan Bimtek pada hari kerja menyebabkan banyak dari mereka berhalangan hadir karena ada urusan lain seperti pekerjaan atau pendidikan.

Selain itu, PPS juga memiliki peran penting untuk menjaga efisiensi prosedur pemungutan suara TPS. Hal ini mencakup pengawasan proses pemungutan suara secara menyeluruh serta penanganan permasalahan yang muncul dalam proses pemungutan suara (Salim, M., P., 2023). Berdasarkan wawancara dengan Vina Erdiana Anggota KPPS Kelurahan Petukangan Utara pada 21 Maret 2024, terdapat beberapa kendala pada saat pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara di TPS Kelurahan Petukangan Utara yang mengakibatkan waktu perhitungan suara menjadi lebih lama dari seharusnya. Vina Erdiana, menyatakan,

*“Karena keterbatasan tempat membuat hanya dapat menggunakan tiga bilik suara, Dimana hal itu berdampak pada antrian DPT yang mendaftar. Sehingga pelaksanaan pemungutan suara dilakukan lebih dari jam 1 Siang.*

*Kemudian, banyak terjadi kesalahan memasukan surat suara ke kotak surat suara sehingga membingungkan KPPS dan menghambat proses perhitungan yang juga berdampak pada proses rekapitulasi hasil yang membuat proses rekapitulasi hasil menjadi lebih larut yang membuat KPPS kelelahan dan tidak fokus dalam menjalankan tugasnya.”(wawancara: 21 Maret 2024).*

Hal ini berdampak pada lamanya proses rekapitulasi hasil yang pada akhirnya menghambat prosedur penghitungan suara. Kemudian, PPS juga bertugas memastikan tata cara rekapitulasi hasil pemungutan suara dilakukan dengan benar (Salim, M., P., 2023). Hal ini berarti mengatasi segala hambatan yang mungkin timbul dalam proses perhitungan suara dan memastikan bahwa temuan rekapitulasi segera disampaikan tepat waktu kepada pemangku kepentingan terkait, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan para saksi yang ada.

#### **Pembekalan Bimtek di Kelurahan Petukangan Utara**

Dalam proses pelaksanaan pemilu baik pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara, hal yang sangat krusial untuk diperhatikan oleh setiap penyelenggara ditingkat TPS yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ialah mampu memahami secara detail dan komperhensif terkait dengan teknis pelaksanaan pemungutan maupun penghitungan suara dalam pemilu 2024. Dalam hal ini, KPU RI yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu di tingkat nasional ataupun lembaga penyelenggaraan ditingkat bawahnya baik provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan mampu memastikan bahwa segala hal teknis terkait tata cara pemungutan dan penghitungan suara mampu dipahami dengan baik oleh seluruh petugas KPPS melalui pemberian bimbingan teknis (BIMTEK) yang komperhensif dan melibatkan seluruh petugas KPPS (Perdana, A, dkk, 2019).

Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu 2024 di Kelurahan Petukangan Utara, permasalahannya sedikit banyak sama dengan yang terjadi pada pemilu tahun 2019, mungkin karena pelaksanaan pemilu yang dilakukan pada pemilu 2019 sama dengan pemilu 2024 yaitu pemilu serentak,

tetapi secara khusus masalahnya terletak pada pertama, keterbatasan jumlah dan pengalaman anggota PPS. Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Petukangan Utara, Yuli Aprianto mengatakan, pemberian BIMTEK dilakukan oleh PPS Kelurahan Petukangan kepada 186 TPS dengan jumlah petugas KPPS sebanyak 1.302 anggota KPPS. (Sakti, T, S, 2024). Pemberian materi BIMTEK oleh PPS Kelurahan kepada KPPS dilakukan dengan membagi jadwal BIMTEK menjadi dua hari dengan 2 sesi karena keterbatasan jumlah petugas PPS Kelurahan yang hanya berjumlah 3 orang. Bagas Saputra (anggota PPS Kelurahan Petukangan Utara), mengatakan,

*“Problemnya adalah jumlah anggota KPPS yang ada di Kelurahan Petukangan Utara 1.302 orang sedangkan jumlah PPS Kelurahan cuma 3 orang jadi kewalahan dan dari 3 orang PPS semuanya baru dan minim pengalaman”.* (wawancara: 21 Maret 2024).

Permasalahan kedua, yaitu terkait dengan jadwal pelaksanaan BIMTEK. Jadwal pelaksanaan yang dilakukan oleh PPS kepada KPPS di Kelurahan Petukangan Utara dilakukan pada Hari Rabu, 31 Januari 2024 dan Kamis 1 Februari 2024 bertempat di aula Universitas Budi Luhur. Yuli Aprianto ketua PPS Kelurahan Petukangan Utara (Sakti, T, S, 2024), menyatakan,

*“Dalam satu hari kita bagi menjadi dua sesi, mulai pukul 08.00-11.00 dan 15.00-18.00, tiap sesi diikuti sekitar 300 anggota KPPS,”*

Dengan jadwal pelaksanaan yang dilaksanakan pada hari kerja tersebut mengakibatkan banyak anggota KPPS yang tidak hadir pada kegiatan BIMTEK tersebut. Sehingga banyak KPPS yang tidak mengetahui apa saja yang disampaikan pada kegiatan BIMTEK tersebut. Dengan begitu perlunya pembekalan yang cukup kepada KPPS dalam pemberian materi BIMTEK sehingga KPPS dapat memahami persoalan teknis tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu 2024. Pelaksanaan pemberian materi BIMTEK di Kelurahan Petukangan Utara hanya dilakukan satu kali oleh PPS Kelurahan dan tidak ada pelaksanaan simulasi mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara oleh PPS Kelurahan.

Keempat, *recruitment* penyelenggara *ad hoc* dalam pemilu. Proses *recruitment* penyelenggara *ad hoc* dalam hal ini khususnya PPK, PPS, dan KPPS tanpa adanya persyaratan yang komprehensif terkait kemampuan calon anggota penyelenggara pemilu. Penyelenggara *ad hoc* sangat strategis kedudukannya karena mereka yang langsung berhadapan atau berhubungan dengan masyarakat sesuai tingkatannya. Namun, sulitnya memperhatikan bagaimana kompetensi dan kemampuan penyelenggara *ad hoc* terkait dengan tugas dalam pelaksanaan pemilu, sehingga calon anggota penyelenggara *ad hoc* dalam hal ini PPK, PPS, dan KPPS masih banyak yang minim pengalaman dan pemahaman terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kelima, profesionalitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal ini terlihat dari adanya kesalahan di beberapa TPS di Kelurahan Petukangan Utara terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara serta proses rekapitulasi di tingkat TPS. Terdapat hal hal teknis yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan TPS yang menyebabkan terjadinya kesalahan baik dalam proses pemungutan, penghitungan, maupun rekapitulasi suara. Bagas Saputra (anggota PPS Kelurahan Petukangan Utara), menyampaikan,

*“Ada di beberapa TPS yang banyak melakukan kesalahan karena adanya ketidaksesuaian penulisan C1 pleno, kemudian di TPS 56 juga ada kejadian KPPS ninggalin TPS dan ditinggal istirahat pulang kerumahnya.” (wawancara: 21 Maret 2024)*

Kesalahan kesalahan tersebut juga disebabkan dari poin ketiga terkait mekanisme pelaksanaan bimtek yang kurang efektif.

Keenam, terkait beban kerja KPPS. Pelaksanaan pemilu 2024 tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019 dimana pelaksanaan pemilu dilakukan serentak dengan melakukan pemilu presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dengan demikian membuat beban KPPS menjadi sangat berat belum lagi KPPS juga harus bertanggung jawab terhadap persiapan kebutuhan di TPS masing masing mengenai persiapan lokasi dan logistik.

Dengan pelaksanaan pemilu serentak yang memuat 5 surat suara, meskipun di wilayah Provinsi DKI Jakarta hanya memuat 4 surat suara karena tidak memilih DPRD kota, tak heran apabila banyak anggota KPPS yang mengeluhkan kelelahan akibat beban kerja yang begitu berat sehingga terdapat beberapa anggota KPPS yang jatuh sakit.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam proses pemungutan dan perhitungan suara oleh KPPS di Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan, pada pemilu 2024. Berdasarkan hasil studi kasus di Kelurahan Petukangan Utara, terlihat bahwa masih banyak kendala dalam proses pemungutan dan perhitungan suara oleh KPPS Kelurahan Petukangan Utara. Hal ini terjadi karena pemahaman anggota KPPS masih terbatas dikarenakan keterbatasan waktu, tempat, dan kesempatan untuk melakukan simulasi langsung, pendistribusian materi Bimtek di Kelurahan Petukangan Utara kurang berhasil. Selain itu, banyak anggota KPPS yang tidak memiliki pengalaman dalam pemilu, sehingga hal ini menjadi sebuah tantangan, terutama mengingat perubahan kebijakan yang terjadi belakangan ini, seperti penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi. Dengan kehadiran SIREKAP, memunculkan masalah lain yakni permasalahan teknologi yang dihadapi oleh KPPS Kelurahan Petukangan Utara, dan kurangnya pengetahuan tentang teknologi menyebabkan kesalahpahaman yang pada akhirnya mempersulit serta menghambat proses penghitungan suara. Dari hasil penelitian yang telah disampaikan, terlihat bahwa PPS mengalami tantangan dalam memastikan pemahaman yang baik dari anggota KPPS, terutama terkait keterbatasan waktu dan tempat untuk melakukan simulasi serta kendala teknologi pada SIREKAP. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi lebih lanjut untuk mengidentifikasi metode pelatihan yang lebih efektif, khususnya dalam mengatasi keterbatasan tersebut.

## REFERENSI

11  
 Hardiyanti, Marzellina, dkk (2022). Urgensi Sistem E-Voting dan Sirekap dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. *Jurnal Equitable Vol 7 No 2(2022)*. Hal 5-6  
<https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4257>

8  
 Indriani, Roza. dkk (2024). Literasi Informasi Petugas KPPS Terhadap Keterpunuhan Hak-Hak Sebagai Pekerja Pada Pemilu 2019. *Jurnal Niara Vol. 16, No 3 Januari 2024*. Hal 561-567. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i3.15845>

Iskandar, Riki. (2024). *KPPS Petukangan Utara Ikuti Bimtek Pemilu 2024*. Diakses pada Minggu, tanggal 31 Maret 2024 dari <https://selatan.jakarta.go.id/berita-selatan/detail/KPPS-Petukangan-Utara-Ikuti-Bimtek-Pemilu-2024>

7  
 Istianda, M., & Zastrawati, A. (2021). Evaluasi penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 kota Makassar. *Sebatik*, 25(1), 92-101.

2  
 Komisi Pemilihan Umum. 2020. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

10  
 Kpu.go.id. (2014). *BUKU PANDUAN KPPS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH*. Diakses pada Jumat, 29 Maret 2024 dari <https://www.kpu.go.id/dmdocuments/Panduan%20KPPS.pdf>

17  
 Kpu.go.id. *Struktur Organisasi KPU*. diakses pada Kamis, 28 Maret 2024 dari <https://www.kpu.go.id/page/read/1098/struktur-organisasi-kpu-ri>

33  
 Kurniawan, Dendy. dkk (2024). Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Blorok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri Vol.2, No.1 Februari 2024*. Hal 56-63 <https://doi.org/10.61132/ardhi.v2i1>

5  
 Lexy, J. Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2018

12  
 Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Menteng, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.

Pradesa, I., P. (2024). Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) dalam Menghadapi Problematika Pemilu 2024. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial Volume 03, Number 04, 2024*. Hal 8-9. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v3i4.2578>

Rosita, Lita. (2020). *Kepentingan Panitia Ad Hoc* diakses pada Kamis 28 Maret 2023 dari <https://www.kpu.go.id/berita/baca/8373/Setiap-organisasi--institusi-ataupun-lembaga--baik-pemerintah-dan-non-pemerintah--pada-saat-tertentu-akan-menggunakan-ad-hoc-dalam-suatu-kegiatan#>

Sakti, T, S. (2024) *Anggota KPPS Petukangan Utara Ikuti Bimtek Penyelenggaraan Pemilu*. Diakses pada tanggal 29 Maret 2024 dari <https://m.beritajakarta.id/read/134400/1302-anggota-kpps-petukangan-utara-ikuti-bimtek-penyelenggaraan-pemilu>

Salim, M., P. (2023). *PPS Pemilu Adalah Panitia Pemungutan Suara, Pahami Wewenang, Tugas, dan Cara Mendaftar*. Diakses pada Jumat, 29 Maret dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5486435/pps-pemilu-adalah-panitia-pemungutan-suara-pahami-wewenang-tugas-dan-cara-mendaftar?page=2>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

# jurnal birpol.pdf

## ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |                                          |     |
|---|------------------------------------------|-----|
| 1 | journal.unismuh.ac.id<br>Internet Source | 8%  |
| 2 | jdi.h.kpu.go.id<br>Internet Source       | 2%  |
| 3 | www.liputan6.com<br>Internet Source      | 1%  |
| 4 | jurnal.wicida.ac.id<br>Internet Source   | 1%  |
| 5 | ejournal.unesa.ac.id<br>Internet Source  | 1%  |
| 6 | vdocuments.mx<br>Internet Source         | 1%  |
| 7 | journal.ugm.ac.id<br>Internet Source     | 1%  |
| 8 | journal.unilak.ac.id<br>Internet Source  | <1% |
| 9 | www.kpu.go.id<br>Internet Source         | <1% |

|    |                                                                                                       |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 10 | <a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a><br>Internet Source                                 | <1 % |
| 11 | <a href="http://ejurnal.umri.ac.id">ejurnal.umri.ac.id</a><br>Internet Source                         | <1 % |
| 12 | Submitted to Universitas Airlangga<br>Student Paper                                                   | <1 % |
| 13 | <a href="http://www.nawacitapost.com">www.nawacitapost.com</a><br>Internet Source                     | <1 % |
| 14 | <a href="http://jamberita.com">jamberita.com</a><br>Internet Source                                   | <1 % |
| 15 | <a href="http://mahesainstitute.web.id">mahesainstitute.web.id</a><br>Internet Source                 | <1 % |
| 16 | <a href="http://purworejo.bawaslu.go.id">purworejo.bawaslu.go.id</a><br>Internet Source               | <1 % |
| 17 | <a href="http://www.theindonesianinstitute.com">www.theindonesianinstitute.com</a><br>Internet Source | <1 % |
| 18 | <a href="http://123dok.com">123dok.com</a><br>Internet Source                                         | <1 % |
| 19 | <a href="http://itcc.itpln.ac.id">itcc.itpln.ac.id</a><br>Internet Source                             | <1 % |
| 20 | <a href="http://nasional.kompas.com">nasional.kompas.com</a><br>Internet Source                       | <1 % |
| 21 | Submitted to Universitas Andalas<br>Student Paper                                                     | <1 % |

22

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

&lt;1 %

23

[download.garuda.ristekdikti.go.id](http://download.garuda.ristekdikti.go.id)

Internet Source

&lt;1 %

24

[hukum.unsrat.ac.id](http://hukum.unsrat.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

25

[ilmupolitik.unja.ac.id](http://ilmupolitik.unja.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

26

[walhisulteng.blogspot.com](http://walhisulteng.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1 %

27

[dkpp.go.id](http://dkpp.go.id)

Internet Source

&lt;1 %

28

[etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

29

[jdih.kotawaringinbaratkab.go.id](http://jdih.kotawaringinbaratkab.go.id)

Internet Source

&lt;1 %

30

[jurnal.uns.ac.id](http://jurnal.uns.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

31

[repository.iainpare.ac.id](http://repository.iainpare.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

32

[tesis.pucp.edu.pe](http://tesis.pucp.edu.pe)

Internet Source

&lt;1 %

33

[winong.kec-mirit.kebumenkab.go.id](http://winong.kec-mirit.kebumenkab.go.id)

Internet Source

&lt;1 %

34

[www.repository.uinjkt.ac.id](http://www.repository.uinjkt.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

35

Muhammad Nuh Ismanu. "Problematic Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pada Pemilu Serentak 2019 : Antara Regulasi dan Implementasi", Jurnal Penelitian Politik, 2020

Publication

&lt;1 %

36

Ummy A'isyah Nurhayati, Baiq Nurul Hasnawati. "Screening Kebugaran dengan Six Minute Walking Test (6MWT) pada Petugas KPUD Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta", JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat), 2024

Publication

&lt;1 %

37

[fee-3zahra.blogspot.com](http://fee-3zahra.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1 %

38

[hai.grid.id](http://hai.grid.id)

Internet Source

&lt;1 %

39

[ppkbadas.blogspot.com](http://ppkbadas.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1 %

40

[pt.scribd.com](http://pt.scribd.com)

Internet Source

&lt;1 %

41

[repository.ar-raniry.ac.id](http://repository.ar-raniry.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

[repository.untar.ac.id](http://repository.untar.ac.id)

42

Internet Source

&lt;1 %

43

[www.coursehero.com](http://www.coursehero.com)

Internet Source

&lt;1 %

44

[www.researchgate.net](http://www.researchgate.net)

Internet Source

&lt;1 %

45

[www.saudijournals.com](http://www.saudijournals.com)

Internet Source

&lt;1 %

46

[www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)

Internet Source

&lt;1 %

47

Lea Cristiani, Nisa Nurachmah, Ginna Glyceria Bonpalda, Amalia Putri Damayanti. "Peran Bidang Administrasi Bawaslu RI dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Pengawasan Pemilu", POPULIKA, 2024

Publication

&lt;1 %

48

[qdoc.tips](http://qdoc.tips)

Internet Source

&lt;1 %

49

[journals.upi-yai.ac.id](http://journals.upi-yai.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off

# jurnal birpol.pdf

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16